

BAB V

Proses Rekrutmen Kepala Daerah Surabaya di PDI Perjuangan

5.1 Proses Rekrutmen di PDI Perjuangan

Partai politik umumnya dianggap sebagai manifest dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri.⁸³ Partai politik merupakan kelompok terorganisir yang mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Ramlan Surbakti juga menyebutkan, fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum.⁸⁴

Ketika melaksanakan fungsi itu partai politik dalam sistem politik demokrasi pasti akan melakukan kegiatan seleksi calon atau kandidat untuk melaksanakan fungsi pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif. Dalam fungsi tersebut partai politik melaksanakan apa yang disebut sebagai fungsi rekrutmen politik. Begitu juga dengan PDI Perjuangan sebagai partai politik yang sudah beberapa kali ikut serta dalam pemilihan umum di Indonesia. Tercatat setidaknya tiga kali pada tahun 1999, 2004, 2009 baik legislatif maupun eksekutif di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dari keikutsertaan PDI Perjuangan

⁸³ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 159

⁸⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 116

sebagai partai politik dalam pemilihan umum di Indonesia. Juga diketahui bahwa partai bermoncong putih tersebut menempati urutan tiga besar partai di Indonesia. Pasti PDI Perjuangan sendiri telah juga melakukan fungsi rekrutmen politik atau seleksi calon-calon.

Rekrutmen politik tersebut digunakan sebagai tahapan-tahapan seseorang untuk menjadi sarana masuk ke dalam kontestasi politik. Rekrutmen politik merupakan suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administrative maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang rekrut/ diseleksi adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik.

Sistem perekrutan politik tentu saja memiliki keragaman yang tidak terbatas. Bagimanakah pola rekrutmen politik dilakukan? Menurut Rush dan Althoff, ada dua cara khusus yang dipergunakan untuk melakukan perekrutan politik. Pertama, seleksi pemilihan melalui jalur ujian serta latihan. Cara lain adalah dengan metode penyortiran, penarikan undian yang digunakan di Yunani kuno. Kemudian metode giliran atau rotasi, perebutan kekuasaan dengan jalan menggunakan atau mengancam kekerasan.⁸⁵

Di PDI Perjuangan mekanisme rekrutmen politik itu sudah tertata dalam aturan partai yang sudah baku di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

⁸⁵ Michael Rush & Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, 186-187

Tangga, serta dalam petunjuk teknis pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Bupati-Wakil Bupati, dan atau calon Walikota-Wakil Walikota

Dalam AD/ART tersebut dalamnya juga di atur mengenai hierarki organisasi secara struktural dalam mengambil keputusan strategis partai. Dari mulai kongres sebagai keputusan tertinggi partai, kedua adalah keputusan DPP partai, ketiga Keputusan DPD partai, dan ke empat adalah keputusan DPC partai. Keputusan yang berjenjang itu harus dipatuhi oleh seluruh kader dan pengurus partai baik di tingkat pusat maupun daerah. Pernyataan tersebut sebagaimana kutipan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan fungsionaris DPC PDI Perjuangan Surabaya tersebut:

“Jadi mekanisme yang ada di PDI Perjuangan itu sudah tertata dalam suatu aturan yang sudah baku. Artinya tidak boleh menyimpang semua dari AD/ART partai. Dalam AD/ART partai itu, keputusan tertinggi kongres, yang kedua DPP partai, yang berikutnya keputusan DPD, jadi ada jenjangnya seperti urutan Undang-Undang dan yang berikutnya adalah DPC.”⁸⁶

Baktiono menambahkan, dalam peraturan yang lebih spesifik mengenai rekrutmen kepala daerah. Yang dilakukan DPC PDI Perjuangan kota Surabaya dalam menjaring dan menyaring calon walikota dan wakil walikota dalam pemilihan umum kepala daerah untuk periode 2010 sampai 2015. Proses tersebut dimulai dengan usulan-usulan dari bawah mulai dari Anak Ranting setingkat RW yang meliputi RT nya ke Ranting setingkat Desa atau Kelurahan. Kemudian masuk ke Pengurus Anak Cabang atau pengurus di tingkat Kecamatan seluruh kota Surabaya. Dari sana lah usulan-usulan itu dijaring dari warga di bawah untuk

⁸⁶ Wawancara dengan Baktiono, Bendahara DPC PDI Perjuangan Surabaya dan anggota Komisi D DPRD Surabaya, pada 05/10/ 2012 pk 13.42 WIB

di usulkan dalam forum yang bernama Rapat Kerja Anak Cabang (Rakerancab) sebelum di bawa ke dalam forum yang bernama Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus).

“.....Di PDI Perjuangan usulan- usulan itu berasal dari cabang ke anak cabang, ranting ke anak ranting mereka juga rapat. Jadi menentukan siapa yang diusung, diusulkan dalam forum yang namanya Rakercabsus “Rapat Kerja Cabang Khusus”. Usulan-usulan itu dijarah dari warga yang dibawah, usulan itu masuk setelah itu dibawa ke forum Rakercabsus. Disana juga ada yang namanya forum Rakerancab “Rapat Kerja Anak Cabang” itu menerima, menjaring atau menyaring usulan dari bawah itu siapa saja. Makanya kalau masuk lewat PDI Perjuangan, harus di lobi dari tingkat bawah atau RW disana juga yang menjaring. Jadi sekarang bukan top down tapi bottom up, disana nanti dipresentasikan dan didebatkan mengapa kok mengusung calon itu baik calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Nanti baru diputuskan dalam forum Rakercabsus, ini sebatas untuk menjaring. Nanti juga dievaluasi kembali oleh DPD Provinsi Jawa Timur, juga nantinya dibawa sampai DPP.”⁸⁷

Mekanisme rekrutmen atau penjaringan di PDI Perjuangan adalah sistem *bottom up*, dan bukan lagi top down. Dimana calon dijarah dari bawah sampai tingkat RW yang mestinya merepresentasikan masyarakat bawah. Yang kemudian dipresentasikan dan didebatkan, sebagai alasan mengapa calon tersebut layak untuk diusung sebagai calon walikota atau wakil walikota. Sampai diputuskan dalam forum Rakercabsus, namun hanya sebatas menjaring. Karena selanjutnya akan dievaluasi kembali oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur yang nantinya akan dibawa sampai ke DPP untuk diputuskan.

⁸⁷ Wawancara dengan Baktiono, Bendahara DPC PDI Perjuangan Surabaya dan anggota Komisi D DPRD Surabaya, pada 05/10/2012 pk 13.42 WIB

Alur rekrutmen kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Surabaya pada tahun 2010 di PDI Perjuangan DPC Surabaya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 13

Tahapan rekrutmen calon kepala daerah di PDI Perjuangan Kota Surabaya

Alur rekrutmen calon kepala daerah di PDI Perjuangan Kota Surabaya

1. Instruksi DPP untuk melakukan penjangkaran
 - 1) DPC melakukan Rapat Cabang
 - 2) Memilih dan menetapkan Kepanitiaan SC (DPC & DPD)
 - 3) Mengagendakan Rakercabsus (tempat, waktu, acara dan peserta)
 - 4) Merancang Tata Tertib dan menyiapkan aturan pendukung
2. PAC melakukan rapat untuk menentukan nama yang akan diajukan dalam Rakercabsus
3. DPC menyelenggarakan Rakercabsus
 - 1) Nama-nama yang diusulkan PAC di inventarisir
 - 2) Nama yang terjaring di ranking
 - 3) Rakercabsus menetapkan nama-nama rekomendasi hasil penjangkaran
4. Berita acara dilaporkan ke DPD Jawa Timur
5. DPD mengirimkan berita acara Rakercabsus ke DPP
6. DPP menerima rekomendasi
 - 1) DPP melakukan survei
 - 2) DPP menerima masukan dan saran
7. DPP melakukan rapat untuk memutuskan rekomendasi calon atau pasangan calon
8. DPP mengeluarkan surat rekomendasi resmi dan langsung diberikan kepada DPC
9. DPC mendaftarkan rekomendasi ke KPUD

Sumber: DPC PDI Perjuangan Surabaya

Mekanisme penjaringan dan penyaringan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota juga telah diatur dalam petunjuk teknis dan pelaksanaan. Peraturan yang berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat partai yang khusus mengatur hal tersebut sebagai pedoman selain AD/ART partai yang telah ada. Disanalah diatur mengenai mekanisme penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah tersebut. Yang mana siapa saja yang ingin mendaftar diperbolehkan baik kader maupun juga non kader asalkan memenuhi syarat. Nama-nama yang telah dijaring tersebut dari bawah mulai Ranting (Desa), Anak Cabang (Kecamatan) yang akan diusung tersebut biasanya di rangking dari satu sampe tiga biasanya.

Setelah itu dibawa usulan tersebut ke DPC, dan oleh DPC dilakukan verifikasi sebelum forum Rakercabsus, untuk memantapkan suara dari bawah tersebut. Setelah itu berita acara disampaikan ke DPD untuk dirapatkan sebelum dilanjutkan ke DPD, namun DPD juga berhak mengurangi atau merekomendasikan nama lain yang belum muncul. Itulah yang dipakai pada waktu proses penetapan Risma, seperti yang dikutip dari hasil wawancara peneliti dengan Nugroho SW sebagai fungsionaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

“Di Partai ini ada mekanisme untuk melakukan rekrutmen, ada juklak tentang penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah baik kota, kabupaten, maupun provinsi. Waktu bu Risma itu masih memakai juklak yang lama, jadi di partai siapa pun yang mau mendaftar dan memenuhi syarat. Jadi misalkan orang yang sudah menjadi pengurus partai, orang yang bukan pengurus partai pun boleh. Setelah itu misalkan, ada nama yang daftar lima orang itu namanya akan dibawa ke forum yang namanya forum Rakercabsus (Rapat Kercabsus) kalau gubernur Rakerdasus. Disanalah kita kasih waktu untuk memantapkan dari sistem bawah ranting (desa), anak cabang (kecamatan) itu kemudian siapa dari rakercabsus

yang akan diusung. Biasanya saat itu ada rangking, orang ini rangking 1 rangking 2, seperti itu. Setelah itu dibawa ke DPC, oleh DPC yang bersangkutan dilakukan fit and proptest, tapi DPD berhak misalkan dari 5 memotong menjadi 3 DPD berhak. Setelah itu dibawa ke DPP itu langkah pertama, DPP akan disana juga melakukan fit and proptest kemudian turunlah yang namanya rekomendasi. Dulu seperti itu, tapi sekarang itu ndak seperti itu, jaman bu Risma dulu seperti itu.”⁸⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wisnu Sakti Buana sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya. Beliau mengatakan mekanisme untuk kepala daerah jelas diatur mulai dari pendaftaran, penjaringan, dan penyaringan itu sudah dilakukan sampai proses Rakercabsus. Dan muncul tiga nama calon Walikota dan Wakil Walikota itu adalah Bambang DH, Saleh Mukadar, dan Wisnu Sakti Buana. Namun Bambang DH akhirnya hanya direkomendasi sebagai calon Walikota karena putusan Mahkamah Agung Bambang DH tidak bisa lagi maju sebagai calon Walikota. Untuk tingkatan Surabaya, DPC hanya melakukan pendaftaran, penjaringan dan penyaringan sampai proses Rakercabsus tersebut adalah proses awal penyaringan. Dari hasil Rakercabsus itu dilaporkan ke DPP melalui DPD yang menyerahkan beserta hasil rapat pertimbangan DPD.

“Mekanisme jelas diatur dalam pendaftaran, penjaringan, dan penyaringan itu sudah dilakukan sampai proses Rakercabsus. kalau dari hasil rakercabsus, sesungguhnya muncul tiga nama calon walikota dan wakil walikota itu satu pak Bambang DH, pak Saleh dan saya (Wisnu Sakti). Karena putusan MA yang memutuskan pak Bambang DH tidak bisa maju sebagai walikota. Dan itu kalau tingkatannya surabaya, DPC hanya melakukan pendaftaran, penjaringan, dan penyaringan sampai proses rakercabsus itu penyaringannya. Dari hasil rakercabsus itu dilaporkan ke DPP melalui DPD, kita memberikan itu ke DPD, nanti DPD yang melaporkan ke DPP.”⁸⁹

⁸⁸ Wawancara dengan Nugroho SW, Wakil Sekertaris DPD PDI Perjuangan Jatim, pada 19/10/2012 pk 10.25 WIB

⁸⁹ Wawancara dengan Wisnu Sakti Buana, Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya dan Wakil Ketua DPRD Surabaya, pada 08/11/ 2012 pk 16.15 WIB

Dari proses yang tidak singkat tersebut nama-nama dijarah dan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat partai. Dengan syarat yang ada di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentunya yaitu ideologi nya harus sama dengan partai. Ideologi yang dimaksud adalah Pancasila 1 Juni 1945, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), Gotong Royong, Kerakyata, dan mereka juga melalui survei. Dari survei yang tertinggi itulah dijarah untuk bisa diputuskan selanjutnya. Dan dalam tenggang waktu tersebut sebelum Rakercabsus dan dimasukkan ke DPD, para calon punya tenggang waktu untuk sosialisasi ke masyarakat.

Menurut pemaparan Baktiono, mereka tidak ada yang karena nepotisme dan uang. Beliau memberikan contoh, bahwa dalam penjaringan ada yang menawarkan 50 milyar dan diberikan fasilitas kantor sampai seluruh Pengurus Anak Cabang. Namun tidak diterima, karena partai tidak menganut konsep jual beli politik. Melainkan siapa dari mereka yang diusung dapat memenuhi standart kualifikasi dan hasil surveinya tinggi. Maka itu yang disampaikan dan dipresentasikan ke DPP partai. DPP partai pun tidak gegabah menerima usulan tersebut, karena mereka juga mempunyai tim surveiyer sendiri sampai ke bawah untuk mengkaji ulang.

“Nama-nama yang dijarah tadi itu penentuannya sampai DPP, itu juga harus memenuhi syarat yaitu mereka ideologinya harus sama dengan partai. Ideologi partai salah satunya pancasila (pancasila 1 Juni 45), NKRI, Bhineka Tunggal Ika, Gotong Royong, Kerakyatan, dan mereka juga melalui survei. Dari siapa dari mereka yang surveinya tertinggi itu yang dijarah, baru bisa diputuskan. Sebelum survei dalam tenggang waktu dalam Rakercabsus sebelum dimasukkan dalam DPD juga harus sosialisasi ke masyarakat, tidak ada mereka juga karena nepotisme atau uang. Bahkan dalam penjaringan barusan ada yang menawarkan 50 milyar itu pun kita diberikan fasilitas kantor untuk seluruh anak cabang. Tapi

partai kami PDIP tidak menganut konsep jual beli politik, jadi siapa mereka yang diusung dan memenuhi standart. Mereka yang bagus dan hasil survei nya tinggi, nanti akan disampaikan dan dipresentasikan ke DPP partai. Dalam DPP pun tidak gegabah menerima laporan partai it, mereka juga mempunyai tim surveiyer sampai kebawah. Jadi DPD punya tim, DPP juga punya tim.”⁹⁰

Setiap partai politik memiliki asas dan orientasi yang berbeda antara satu dengan lainnya yang disebut tipologi partai politik . Semakin banyak kepentingan politik yang diusung oleh partai politik dalam suatu negara, maka ini mencerminkan bahwa kepentingan masyarakat yang ada di negara tersebut beragam. Untuk melihat banyaknya kepentingan dalam suatu negara, maka dapat dilihat dari asas dan orientasi yang di anut dari masing-masing partai politik dalam negara tersebut.⁹¹ Dari uraian mengenai PDI Perjuangan terlihat bahwa tipologi partai politik ini adalah partai politik doktriner. Bisa dilihat bahwa PDI Perjuangan sebagai partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologi pancasila yang dibawanya.

Mengenai persyaratan calon, Saleh Mukadar sebagai Ketua Cabang sebelumnya juga menjelaskan bahwa calon boleh dari luar kader. Namun kader asli partai menurutnya tidak perlu diragukan lagi secara ideologi, visi-misi, dan komitmennya yang sesuai dengan kepentingan rakyat. Penekanan ideologi dan platfoam partai yang berdasarkan kerakyatan ini lah sebagai syarat khusus di luar syarat perundang-undangan yang berlaku. Ini digunakan partai untuk memberi identitas, yang mencirikan bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang doktriner adau berdasar pada ideologi.

⁹⁰ Wawancara dengan Baktiono, Bendahara DPC PDI Perjuangan Surabaya dan anggota Komisi D DPRD Surabaya, pada 05/10/2012 pk 13.42 WIB

⁹¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 112

“Calon boleh dari luar kader, tapi kalau kader asli partai kan dia tidak perlu diragukan lagi secara ideologi, visi-misi dan komitmennya yang sesuai platfoam untuk kepentingan rakyat disetiap kebijakan yang dia ambil.” “Syarat untuk maju dari PDI Perjuangan secara umum sama seperti di Undang-Undang. Secara khusus syarat calon harus sesuai ideologi dan platfoam partai, karena partai ini kan berdasarkan kerakyataan, sama secara ideologi dan platfoam.”⁹²

Kemudian dalam kaitannya dengan proses fit and propertest dan survei, Dewan Pimpnan Cabang tidak boleh melakukan. Minimal harus dilakukan oleh struktural satu tingkat di atasnya, yaitu jika walikota atau bupati yang melakukan di DPD. Tapi kalau survei dan sebagainya itu DPP yang melakukan. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada unsur kepentingan apapun, kalau cabang sendiri bisa-bisa hasilnya subjektif dan tidak objektif lagi. Karena di banyak daerah ada Ketua Cabangnya yang mencalonkan sendiri, kalau surveinya dilakukan cabang akan kelihatan siapa hasil survei tertinggi. Oleh sebab itu fit and propertest dilakukan oleh satu tingkat di atasnya yaitu DPD dan survei semua dipegang oleh DPP. Itulah yang disampaikan Wisnu Sakti buana dalam wawancara.

“Fit and propertest dan survey DPC tidak boleh melakukan, jadi kalau tingkatannya di walikota atau bupati yang melakukan fit and propertest itu di DPD. Tapi kalau survey dan sebagainya itu DPP, kita boleh melakukan survey sendiri itu sebagi laporan. Tapi DPP, survey yang dipegang ya survey oleh DPP sendiri. Sehingga tidak ada unsur kepentingan apapun, kalau cabang sendiri yang melakukan ya, kalau kemarin memang ada kepentingan di DPC yang penting kita maju untuk menang, apapun. Di banyak daerah ada yang ketua cabangnya nyalon sendiri, la itu kan nanti survei nya jadi repot, subjektif, tidak objektif lagi. Makanya survey tidak dilakukan oleh cabang, fit and propertest dilakukan oleh satu tingkat di atasnya oleh DPD. Surveinya semua dipegang oleh DPP”⁹³.

⁹² Wawancara dengan Saleh Ismail Mukadar, Mantan Ketua DPC Surabaya 2005-2010 dan Anggota Komisi E DPRD Jatim, pada 2/11/2012 pk 15.08 WIB

⁹³ Wawancara dengan Wisnu Sakti Buana, Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya dan Wakil Ketua DPRD Surabaya, pada 08/11/2012 pk 16.15 WIB

Naman pada waktu pemilukada kota Surabaya yang lalu tidak ada proses fit and propertest sama sekali. Yang dibenarkan oleh Wisnu Sakti Buana, yang juga selaku kandidat calon hasil Rakercabsus. Dalam prosesnya hasil Rakercabsus tersebut langsung dilaporkan ke DPP. Karena dari hasil Rakercabsus itu kandidat yang muncul dianggap sudah clear secara persyaratan, dan fit and propertest itu menjadi hak DPP untuk dilakukan atau tidak menurutnya.

“Surabaya waktu itu tidak ada yang fit and propertest, sama sekali. Saya (Wisnu Sakti) pun sebagai kandidat pun tidak dilakukan fit and propertest. Karena dianggap kita semua sudah clear, jadi langsung dilaporkan ke DPP. Jadi fit and propertest itu hanya hak nya DPP, DPC juga tidak melakukan di Surabaya. Sehingga dilaporkan saja langsung Rakercabsus oleh DPD ke DPP, itu prosesnya.”⁹⁴

Pertimbangan lainnya yang digunakan adalah masalah track record. Agar dapat melihat apakah calon kandidat tersebut mengalami masalah hukum atau tidak. Dan yang kecenderungan calon kandidat tersebut untuk keberpihakannya terhadap masyarakat atau rakyat kecil. Karena ideologi partai pancasila yang mengharuskan harus seperti itu. Ditambahkan oleh Nugroho SW, disamping melakukan fit and propertest sekarang juga ada psycotest untuk melihat kecenderungan tersebut. Apakah dia peduli atau tidak terhadap kaum yang lemah? Namun dengan itu pun partai juga sering mengalami kecolongan dan sering tertipu akan hasilnya.

“Tentu saja masalah track record, apakah dia sudah pernah mengalami masalah hukum. Kedua, apakah dia mempunyai kecenderungan untuk berpihak kepada rakyat, karena ideologi kita pancasila. Makanya sekarang kita disamping fit and propertest ada psycotest, itu untuk melihat kecenderungan orang seperti apa. Apakah dia cenderung orang peduli atau tidak, cenderung menolong yang lemah atau tidak kita lihat

⁹⁴ Wawancara dengan Wisnu Sakti Buana, Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya dan Wakil Ketua DPRD Surabaya, pada 08/11/2012 pk 16.15 WIB

disitu. Dengan itu pun kita masih sering tertipu, tapi kan kita sudah ada upaya-upaya untuk lebih baik.”⁹⁵

Di luar hasil Rakercabsus tersebut, di tengah jalan muncul nama Risma. Namun itu dianggap wajar karena proses sebelumnya yaitu Rakercabsus adalah penjangkaran awal. Di PDI Perjuangan dijelaskan oleh Nugroho bahwa boleh saja mendaftar melalui Pengurus Anak Cabang, DPC, DPD, maupun di DPP. Untuk menghindari apabila mau mendaftar lewat cabang dan tidak diterima, karena ketua cabangnya mau mencalonkan sendiri. Maka calon kandidat diperbolehkan mendaftar melalui struktural di atasnya apabila dihalang-halangi untuk mendaftar. Namun tetap harus memenuhi syarat seperti yang dilakukan di Surabaya pada waktu tersebut.

“Berkaitan dengan kemunculan Risma di tengah jalan, jadi di PDI itu boleh mendaftar lewat PAC, DPC, atau DPD, atau bahkan di DPP. Karena misalkan ada orang mau nyalon lewat cabang, ya tidak diterima wong ketua cabangnya maunya sendiri. Entah dengan cara-cara apa, entah dihalang-halangi. Maka dia bisa mendaftar lewat DPD, lewat PAC yang membawa ke DPD. DPD tidak boleh menolak sepanjang memenuhi syarat. Surabaya juga prosesnya seperti itu, Rakercabsus itu sudah namanya itu kemudian sebelum DPD mengirim, DPD kan ada masukan lagi ya tidak apa-apa, walaupun tidak ikut proses dari awal. Bahkan DPP itu bisa menunjuk, orang diluar yang sama sekali tidak pernah mendaftar karena pertimbangan tertentu. Tapi di Jawa Timur belum pernah orang yang belum mendaftar ditunjuk. Bu Risma tentu saja sudah ada komunikasi sebelumnya, setidaknya ada dua kali pertemuan untuk pernyataan kesanggupan dan lain sebagainya. Misalkan pernyataan tidak akan mundur di tengah jalan, kita rekom terus mundur ditengah jalan kan repot.”

Di DPD juga mempunyai kewenangan untuk memasukkan saran dan pertimbangan calon kandidat, walaupun tidak melalui proses dari awal menurut Nugroho itu dibenarkan sebelum dikirim hasilnya ke DPP. Bahkan juga disampaikan bahwa DPP bisa saja menunjuk orang diluar sama sekali yang namanya telah direkomendasi, karena DPP mempunyai kewenangan itu.

⁹⁵ Wawancara dengan Nugroho SW, Wakil Sekertaris DPD PDI Perjuangan Jatim, pada 19/10/2012 pk 10.25 WIB

Jenjang karir dalam jalur politik yang ada di PDI Perjuangan ini bisa dilihat bahwa mekanismenya berjenjang mulai dari bawah untuk menempati jabatan struktural partai. Atau harus melewati tahapan demi tahapan proses dari struktural di bawahnya. Namun berbeda dengan proses yang dilakukan untuk pemilihan calon walikota untuk Surabaya dari PDI Perjuangan. Karena walaupun secara birokratis Risma telah mempunyai track record dalam kinerjanya sebagai birokrat dari jalur non politik namun secara politik Risma tidak pernah sama sekali melalui jenjang tahapan politik. Risma mengawali karir birokratnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sehingga tercatat beliau pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya, pernah diangkat menjadi Kepala Dinas Pertamanan, dan terakhir sebagai Kepala Bapekko sebelum menjadi Walikota saat ini karena kinerjanya yang bagus. Seperti yang disampaikan Baktiono dalam wawancara berikut.

“Bu Risma diangkat dari pegawai biasa dari pegawai Balitbang, sementara pak Bambang DH walikota. Itu semua karena dia bagus, diangkat lagi menjadi ketua Dinas pertamanan dia juga bagus. Dan terakhir diangkat Badan Perencanaan Kota bagus. Kan luar biasa kan, diangkat lagi menjadi walikota.”⁹⁶

Dalam tradisi partai yang kuat menurut Micle Rush dan Philip Altoff mengatakan, untuk menjadi anggota sebuah partai dalam tradisi Inggris memerlukan lebih banyak pengorbanan dari pada sekedar mendapatkan kartu anggota. Selain mendapatkan sebuah kartu anggota seseorang juga harus rajin membayar iuran anggota serta mengikuti kegiatan partai. Bagi mereka yang memiliki ambisi besar untuk meraih karir politik yang lebih tinggi perlu

⁹⁶ Wawancara dengan Baktiono, Bendahara DPC PDI Perjuangan Surabaya dan anggota Komisi D DPRD Surabaya, pada 05/10/2012 pk 13.42 WIB

memasuki tradisi magang yang sudah baku dalam tradisi partai kuat Inggris. Setiap anggota legislatif berhak untuk menapak karir hingga puncak karir sebagai Perdana Menteri Inggris dengan syarat telah menjalani masa magang yang sangat lama dan menuntut berbagai pengorbanan.

Risma yang bukan kader partai yang akhirnya diusung oleh PDI Perjuangan dalam keputusan rekomendasi DPP tersebut. Walaupun secara politik belum mempunyai track record dalam karir politiknya dengan masuk menjadi anggota ataupun kader partai. Namun Risma mempunyai karir birokrat yang bisa mengantarkan dirinya menjadi Walikota Surabaya. Itu menjadi nilai tambah karena bisa dikatakan beliau walaupun diusung dari PDI Perjuangan dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. Selain Bambang DH yang tidak bisa maju lagi sebagai calon Walikota Surabaya.

Kemunculan Risma

Keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusung Tri Rismaharini yang saat itu menjabat Kepala Bappeko Surabaya. Kemunculan Risma itu mengejutkan banyak pihak, karena sebelumnya partai nasionalis sekuler ini mengusung duet Saleh Ismail Mukadar-Bambang Dwi Hatono. Risma yang memang dikenal sebagai loyalis Bambang DH walikota dari partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini. Kemunculan Risma yang konyang pengalaman di birokrasi Pemkot Surabaya dan bergender wanita membuat dinamika pilwali Surabaya makin meninggi.

Kemunculan Risma tersebut berawal dari survei yang dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan saat proses penyaringan yang dilakukan dengan menurunkan tim survei ke Surabaya. Dari beberapa survei yang dilakukan internal partai

bergambar banteng moncong putih tersebut sampia ke tiga kalinya tren elektabilitas Risma mengalami tren yang sangat dinamis. Walaupun dengan prosentase yang tidak besar hanya 2% diawal. Namun elektabilitasnya semakin menguat dengan isu yang dilempar ke publik. Hal tersebut tidak lepas dari elit PDI Perjuangan yaitu almarhum Pak Tjip yang juga ke DPP untuk memberikan masukan selain Bambang DH sendiri selaku calon Wakil Walikota saat itu.

Partai menganggap bahwa Risma mengalami tren elektabilitas yang sangat baik, karena track recordnya selama memimpin beberapa jabatan penting di lingkungan pemkot Surabaya dan berhasil. Ditambah dengan Risma yang dianggap tidak pernah membuat resistensi dengan berbagai kelompok. Membuat beliau dapat diterima oleh semua kelompok ketimbang Saleh Mukadar yang terlalu sering membuat resistensi.

Modal Kandidat

Fukuyama (1995) mendefinisikan, modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. Sehingga modal sosial sebagai suatu rangkian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama. Burt (1992) mendefinsikan, modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi ⁹⁷ (berhubungan) satu sama

⁹⁷ Menurut Burt (1992), kemampuan berasosiasi ini sangat tergantung pada suatu kondisi dimana komunitas itu mau saling berbagi untuk mencari titik temu norma-norma dan nilai-nilai bersama. Apabila titik temu etis-normatif ini diketemukan, maka pada gilirannya kepentingan-kepentingan individual akan tunduk pada kepentingan-kepentingan komunitas kelompok.

lain dan selanjutnya menjadi kekuatan yang sangat penting bukan hanya bagi kehidupan ekonomi akan tetapi juga setiap aspek eksistensi sosial yang lain.

Modal sosial itulah yang sudah dibangun oleh salah satu kandidat calon walikota dari PDI Perjuangan. Di mana modal sosial tersebut dibentuk melalui track record yang dibangun nya. Artinya pengalaman kesuksesan kinerja juga menjadi bahan penting pertimbangan. Yang dengan modal itulah bisa mengangkat Tri Rismaharini menjadi calon walikota dari PDI Perjuangan dan akhirnya terpilih menjadi walikota Surabaya periode 2010-2015. Modal sosial tersebut adalah sebagai berikut

Profil Calon Walikota dari PDI Perjuangan⁹⁸

Nama: Tri Rismaharini

Tempat/tanggal lahir: Kediri/20 November 1961

Suami: Djoko Saptoadji (45)

Anak:

- Fuad Nenardi (17)
- Tantri Gunarni (12)

Pendidikan:

- SD Negeri di Kediri, 1973
- SMP Negeri X Surabaya, 1976
- SMU Negeri V Surabaya, 1980
- S-1 Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), 1987
- S-2 Manajemen Pembangunan Kota Surabaya ITS, 2002

Penghargaan:

- Pelajar Teladan SD
- S2 Cum Laude Manajemen Pembangunan Kota
- Satya Lencana Karya Satya 2005

⁹⁸ Diakses melalui <http://beritadaerah.com/journal/success/21288>, pada 02/02/2013 pk 19.00 WIB

Karya:

- E-Procument Kota Surabaya

Riwayat Jabatan:

- Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Bappeko Surabaya, 1997-2000
- Kepala Seksi Pendataan dan Penyuluhan Disbang, 2001
- Kepala Cabang Dinas Pertamanan, 2001
- Kepala Bagian Bina Bangunan, 2002
- Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan, 2005
- Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2005-sekarang

Gambaran diatas memperlihatkan bagaimana modal politik Tri Rismaharini dibentuk atas dasar modal sosial yang dibangunnya untuk mendapatkan kekuatan politik. Keberhasilan memimpin beberapa posisi strategis di lingkungan pemkot Kota Surabaya, memperlihatkan track record yang baik untuk menaikkan elektabilitas kandidat. Itu dikarenakan Risma tidak mempunyai modal ekonomi yang kuat untuk memenangkan pemilukada. Hanya bangunan-bangunan sosial yang telah dilalui menjadikan modal awal yang cukup baik untuk mendulang elektabilitas pemilih.

5.2 Oligarki Keputusan Elit Partai

Hasil Rakercabsus DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya pada 18 Agustus 2009 telah merekomendasi dan menunjuk 3 nama yang bakal maju di pemilukada kota Surabaya 2010. Tiga nama tersebut adalah Bambang DH, Saleh Mukadar, dan Wisnu Sakti Buana. Namun rekomendasi keputusan DPP partai tidak sesuai dengan nama-nama hasil rekomendasi dari DPC melalui Rakercabsus atau secara struktural berada dibawah DPP.

Mengenai aturan partai yang mengatur rekrutmen kepala daerah khususnya di Surabaya. Itu juga di ungkapkan Saleh Mukadar sebagai mantan Ketua DPC PDI Perjuangan periode 2005-2010. Yang menjelaskan bahwa rekrutmen politik di PDI Perjuangan sendiri dipilih melalui Rakercabsus. Dalam proses tersebut terdapat usulan-usulan yang merekomendasi beberapa pilihan nama. Pertama, Bambang DH Walikota-Saleh Mukadar Wakil Walikota, Kedua, Saleh Mukadar Walikota- Bambang DH Wakil Walikota. Hal tersebut disebabkan Bambang DH dihitung dua sudah dua periode menjabat sebagai Walikota Surabaya. Dan yang ketiga adalah Wisnu Sakti Buana sebagai calon Wakil Walikota.

*“Rekrutmen politik di PDI Perjuangan sendiri dipilih melalui Rakercabsus, dalam proses Rakercabsus pada waktu itu terdapat usulan-usulan yang merekomendasi beberapa pilihan. Pilihan pertama, Bambang DH Walikota Saleh Mukadar Wakil Walikota, Karena pada waktu itu kita sedang proses pengajuan Judicial Review di MK, pilihan kedua Saleh Mukadar Walikota Bambang DH Wakil Walikota. Penyebabnya Bambang DH dihitung sudah dua periode menjabat sebagai Walikota, padahal periode pertama hanya meneruskan kepemimpinan Sunarto yang tumbang di tengah jalan pada waktu itu. Dan yang ketiga hanya sedikit sekali yang mengusulkan untuk Wisnu Sakti Buana menjadi calon Wakil Walikota”.*⁹⁹

Dari ketiga usulan nama-nama hasil Rakercabsus tersebut dibawa ke DPP setelah melalui rapat DPD. Namun dalam perjalanan Mahkamah Konstitusi menolak Judicial review yang dilakukan oleh partai yang menilai bahwa Bambang DH pada periode pertama hanya meneruskan kepemimpinan Sunarto yang meninggal dunia. Kemudian DPC mengajukan rekomendasi yang diusulkan Saleh

⁹⁹ Wawancara dengan Saleh Ismail Mukadar, Mantan Ketua DPC Surabaya 2005-2010 dan Anggota Komisi E DPRD Jatim, pada 2 /11/2012 pk 15.08 WIB

Walikota – Bambang Wakil walikota sambil menunggu rekomendasi keputusan DPP. Ini diungkapkan dalam wawancara dengan saleh berikut ini.

*“Dari ketiga usulan itu nama-nama dari hasil Rakercabsus, kita bawa ke DPP melalui DPD setelah melalui rapat DPD dari hasil Rakercabsus. Namun dalam perjalanan Mahkamah Konstitusi menolak Judicial Review kita. Kemudian dari sini yang rekomendasi yang diusulkan Saleh Walikota Bambang DH Wakil Walikota, sambil menunggu keputusan rekomendasi DPP”.*¹⁰⁰

Namun dalam perjalanan, tanpa melalui mekanisme Rakercabsus turun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat yang memutuskan calon Walikota yaitu Risma dan Wakil Walikota yaitu Bambang DH. Tanpa melalui mekanisme Rakercabsus yang menjaring dari bawah. Dimana nama Risma dikatakan Saleh Mukadar tidak muncul dari bawah. Atau tidak ada usulan-usulan lebih dahulu dari suara melalui struktural yang ada di Anak Ranting, Ranting, dan PAC-PAC (Pengurus Anak Cabang) sampai proses Rakercabsus. Bahkan dengan kesal Bambang menyampaikan bahwa yang diusulkan nama Saleh Mukadar dengan Bambang DH, namun rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP adalah Risma dengan Bambang.

*“Dalam perjalanan tanpa melalui mekanisme rakercabsus turun rekomendasi dari DPP yang memutuskan calon Walikota Risma dan Wakil Walikota Bambang DH, tanpa melalui mekanisme yang sama atau Rakercabsus dari bawah. Nama Risma tidak muncul dari bawah, langsung dari langit dia, langsung dari atas. Mestinya kan usulan-usulan lebih dulu dari bawah, cabang yang didalamnya ada PAC-PAC, Ranting-Ranting, dan Anak Ranting sampai proses Rakercabsus. Jadi yang diusulkan nama saya (Saleh Mukadar) dengan Bambang, tapi yang keluar nama Risma dengan Bambang”*¹⁰¹

¹⁰⁰ Wawancara dengan Saleh Ismail Mukadar, Mantan Ketua DPC Surabaya 2005-2010 dan Anggota Komisi E DPRD Jatim, pada 2/11/2012 pk 15.08 WIB

¹⁰¹ Wawancara dengan Saleh Mukadar, Mantan Ketua DPC Surabaya 2005-2010 dan Anggota Komisi E DPRD Jatim, pada 2/11/2012 pk 15.08 WIB

Oligarki keputusan partai tersebut terlihat karena kuatnya dominasi partai politik di tingkat pusat, menandakan bahwa tidak sejalan sistem pengelolaan partai politik dengan pengelolaan negara. Partai-partai politik yang ada masih di kelola secara sentralistik, sementara relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah telah didesentralisasikan. Di dalam sistem kepartaian yang terdesentralisasi, cabang-cabang partai yang ada di daerah, dalam taraf tertentu memang masih diberi otoritas untuk menentukan kebijakan-kebijakan sendiri. Tetapi, tidak sedikit kebijakan strategis partai di daerah harus memperoleh persetujuan dari pusat.¹⁰²

Hal tersebut juga terjadi pada rekomendasi DPP PDI Perjuangan yang memutuskan untuk memasang Tri Rismaharini dengan Bambang DH untuk maju sebagai calon walikota dan calon wakil walikota dalam pilkada kota Surabaya, tidak bisa dipungkiri tidak lepas dari peran berbagai elit lokal yang mempengaruhi pertimbangan keputusan DPP partai. Salah satunya adalah dukungan Sutjipto atau yang akrab dipanggil Pak Tjip. Dimana beliau adalah salah satu sesepuh atau orang yang juga dianggap berperan penting mempengaruhi keputusan partai. Terutama keputusan pimpinan pusat partai bergambar moncong putih tersebut. Pak Tjip memang punya kedekatan yang sangat kuat dengan Megawati Sukarno Putri, karena beliau lah yang pernah menjadi panglima perang dalam kemenangan dalam awal kemunculan Mega di panggung politik semenjak masih PDI hingga berganti menjadi PDI Perjuangan.

“Kalau saya dengar, ada orang-orang yang bertemu langsung dengan bu Mega. Bu Mega berani mutusi begitu, kan ada permintaan langsung dari

¹⁰² Kacung Marijan, *Demokratisasi Di Daerah, Pelajaran Pilkada Secara Langsung*, 50

pak Tjip. Karena pak Tjip mempunyai kedekatan emosional yang cukup tinggi dengan Bu Mega, tapi kedekatan emosional seperti ini kan merusak mekanisme partai. Aturan sudah dibuat bagus-bagus, tapi dilanggar, sama saja.”¹⁰³

Namun dukungan Sutjipto pada Risma dinilai melanggar SK DPP no 204 tahun 2005 tentang penjaringan dan penyaringan kepala daerah. Seharusnya, dukungan pada Bacawali atau Bacawawali harus melalui mekanisme partai. Yang seharusnya memunculkan nama melalui mekanisme partai dari bawah, sampai pada rekomendasi hasil Rakercabsus.

*“Mekanisme seperti itu kan menciderai demokrasi, mekanisme itu yang menyebabkan jadi salah kan. Kalau PDI Perjuangan sekarang menerima akibatnya, ya salahnya partai dia. Menyalahi aturan-aturan sendiri, aturan yang dibuat sendiri, terus dilanggar sendiri. Semestinya kalau saya sudah tidak dipakai lagi, harus ada mekanisme kembali. Mekanisme dari bawah, Rakercabsus. Itu kan namanya jadi ada yang terdzolimi kalau seperti itu, saya yang terdzolimi”.*¹⁰⁴

Mekanisme seperti itu bisa saja mencederai demokrasi. Dimana mekanisme yang dilalui dari bawah, lalu peraturan itu dilanggar dengan berbagai alasan. Saleh juga mengatakan kekecewaannya, bahwa kalau PDI Perjuangan sekarang menerima akibatnya itu akibat salahnya sendiri. Aturan yang sudah dibuat namun juga dilanggar sendiri pada saat proses implementasinya. Rakercabsus adalah mekanisme dari bawah yang semestinya sangat bagus untuk menjaring langsung dari bawah melalui struktural partai yang sampai tingkat RW tersebut. Mekanisme yang tidak berasal dari bawah tersebut juga menimbulkan kekecewaan, karena merasa ada yang terdzolimi dari salah seorang kandidat

¹⁰³ Wawancara dengan Saleh Mukadar, Mantan Ketua DPC Surabaya 2005-2010 dan Anggota Komisi E DPRD Jatim, pada 2/11/2012 pk 15.08 WIB

¹⁰⁴ Wawancara dengan Saleh Mukadar, Mantan Ketua DPC Surabaya 2005-2010 dan Anggota Komisi E DPRD Jatim, pada 2/11/2012 pk 15.08 WIB

calon. Dimana calon tersebut juga telah melakukan kerja politik untuk mendulang suara dalam proses pemilihan.

Pandangan tersebut berbeda dengan apa yang diungkapkan Wisnu Sakti Buana, dimana Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai mempunyai penilaian tersendiri mengenai hasil keputusan rekomendasinya. Dan salah satunya adalah pertimbangan dari beberapa orang yang dipanggil untuk dimintai pendapat oleh DPP. Dari kriteria yang diajukan oleh pimpinan pusat partai tersebut, orang-orang yang dipanggil karena mempunyai pengaruh maupun peran penting akan dimintai pendapat. Pendapat tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan, termasuk pendapat dari Bambang DH dan juga Risma. Hal tersebut tidak dipungkiri oleh Wisnu Sakti Buana sebagai Ketua DPC Surabaya periode 2010-2015 ini.

“DPP juga punya penilaian sendiri, dan salah satunya juga pastinya ada beberapa orang yang dipanggil ke DPP untuk dimintai pendapat termasuk pak Bambang DH sendiri. Pak Bambang dan Bu Risma juga ke DPP. Tidak ada aturan partai yang dilanggar, sudah sesuai dengan aturan partai. Yang perlu dipahami itu adalah keputusan rekomendasi itu ada di DPP. Yang sering di anggep khalayak, bursa yang dicabang kok tidak muncul, ndak ada urusan dengan bursa yang ada di cabang. Karna mekanisme partai itu, proses rakercabsus yang digelar cabang-cabang itu hanya salah satu masukan buat DPP. DPP menentukan yang lain, ya bisa. DKI contohnya, Pak Jokowi ndak daftar tapi yang muncul Pak Jokowi ya menang kita.”¹⁰⁵

Menurut Wisnu, tidak ada peraturan partai yang dilanggar melainkan sudah sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan partai. Karena seperti diketahui dalam AD/ART, keputusan tertinggi setelah Kongres adalah Keputusan DPP. Dalam hal ini juga diatur dalam Juklak petunjuk teknis dan penyelenggaraan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan dalm pemilihan

¹⁰⁵ Hasil Wawancara, Wisnu Sakti Buana , Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya dan Wakil Ketua DPRD Surabaya, pada 08/11/2012 pk 16.15 WIB

umum kepala daerah. Di sana dijelaskan bahwa keputusan final untuk merekomendasi juga di tangan DPP partai. Tidak harus nama yang ditetapkan itu muncul di bursa yang ada di cabang, atau dalam proses Rakercabsus. Karena mekanisme partai dalam hal Rakercabsus tersebut digelar cabang-cabang hanya sebagai salah satu masukan untuk DPP.

5.3 Rekomendasi Partai Sebagai Keputusan Partai

Suhu politik di internal PDI Perjuangan menjelang turunnya rekomendasi calon walikota Surabaya memanas bahkan perpecahan pun mulai tampak pada waktu itu. Panasnya situasi itu dipicu oleh tarik ulur kepentingan terkait calon walikota Surabaya yang akan diusung PDI Perjuangan membuat para elit partai tersebut bersikap hati-hati. Fenomena perseteruan antar kader dalam beberapa partai politik, terkait perpecahan dukungan terhadap kandidat calon mencuat seiring berjalannya proses pemilukada kota Surabaya. Perpecahan yang terjadi menjelang pemilukada Surabaya tahun 2010 didominasi oleh perpecahan dukungan internal terhadap kandidat calon masing-masing partai politik. Salah satunya ialah partai politik yang mengusung pasangan Risma-Bambang yang maju dalam pemilukada 2010 di kota Surabaya yaitu PDI perjuangan. Dimana DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya yang semula merekomendasikan Bambang DH atau incumben dengan Saleh Mukadar anggota DPRD Propinsi Jawa Timur dari hasil Rakercabsus.

Rekomendasi DPP PDI Perjuangan akhirnya jatuh kepada pasangan Tri Rismaharini (Kepala Bapekko Kota Surabaya) dan Bambang DH Walikota Surabaya (incumben). Hal yang menarik tentunya karena Bambang DH

dipasangkan dengan Risma yang notabene adalah bawahan dari Bambang di periode kepemimpinan sebelumnya sebagai walikota Surabaya. Kondisi tersebut salah satunya adalah buntut dari Bambang DH yang saat ini menjabat sebagai walikota Surabaya terbentur aturan Undang-Undang yang tidak memperbolehkan dirinya mencalonkan kembali sebagai Walikota. Karena putusan Mahkamah Konstitusi yang menganggap Bambang DH sudah menjabat dua periode kepemimpinan sebagai walikota Surabaya.

“Keputusan final itu ada di DPP, semua itu terkait dengan mekanisme partai. Sehingga hasil rakercabsus itu kita laporkan ke DPD dan langsung ke DPP itu kita laporkan. Dari DPP lah kita nanti menunggu rekomendasi, di DPP biasanya sebelum menurunkan rekom itu ada tim independen yang memang ditunjuk oleh DPP dan kita tidak tau itu melakukan survey. Jadi hasil rakercabsus itu merupakan salah satu masukan buat DPP untuk menentukan rekom, bukan faktor utama. Ada masalah fit and propertest yang bila diperlukan itu dipanggil untuk dilakukan. Ada lagi masalah survey, jadi banyak sebenarnya yang diperlukan DPP sebelum menentukan rekomnya. Dari proses itu, munculah rekom Bu Risma sama Pak Bambang DH. Itu langsung dari DPP.”¹⁰⁶

Sehingga memang dalam PDI Perjuangan keputusan tertinggi ada pada keputusan DPP. Yang memang diatur dalam mekanisme partai, sehingga oligarki partai memang tidak bisa dihindari. Namun kebijakan dari DPP bisa menjadi sebuah keputusan yang sangat arif, apabila mempertimbangkan aspek lain selain hasil Rakercabsus. Termasuk *track record*, hasil *fit and proper test* maupun hasil survei di masyarakat. Untuk partai lebih tepat menentukan pilihannya, yang terkadang hanya ditunggangi oleh kepentingan sebagian kelompok saja. Wisnu sebagai Ketua DPC juga tidak menampik bahwa ada oligarki tersebut.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Wisnu Sakti Buana, Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya dan Wakil Ketua DPRD Surabaya, pada 08/11/2012 pk 16.15 WIB

“Kalau rekom iya, tapi semua usulan itu dari bawah. Kenapa itu ada di DPP, karena di atas kan lebih tidak subyektif menentukan pilihan, gitu. Jadi lebih obyektif gitu kan, karena tidak ada kepentingan atau ndak ada subyektifitas kepentingan apapun. Tidak semua aturan itu harus saklek, mekanisme itu kan hanya masukan untuk DPP. Masukannya juga jadi pertimbangan, iya. Kalau tidak mungkin memutuskan itu, apa ya harus memaksakan itu.”¹⁰⁷

Bationo di lain tempat juga menjelaskan bahwa ketiga nama yang muncul dalam Rakercabsus itu adalah proses DPC untuk menjaring usulan. Putusan tertinggi dalam partai sesuai dalam amanat kongres dalam AD/ART PDI Perjuangan memang keputusan itu ada di DPP. Kalau DPP menganggap calon kandidat tersebut lemah, dan tidak bisa menghadapi calon- calon musuhnya yang ada dalam pemilu kepala daerah nantinya. Maka partai harus mencari alternatifnya, karena partai tidak akan mau apabila kalah dalam pentas politik kepala daerah. Rakercabsus adalah sebagai penjaringan, dan waktu untuk kandidat untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat langsung. Kalau dianggap tidak kuat menghadapi lawan calon alternative akan dipilih yang pas dan bisa merebut hari rakyat.

“Dari ketiga nama yang muncul di Rakercabsus kemudian muncul nama Bu Risma itu kan kita menjaring. Putusan tertinggi itu tetap di dalam AD/ART itu kongres setelah itu keputusan DPP. Kalau itu dianggap lemah, dalam menghadapi musuh-musuh politiknya, maka kita tidak dipilih untuk menjadi calon yang dimajukan oleh partai di pemilukada. Makanya harus mencari calon alternatifnya, karena mana mau partai itu kalah dalam perhelatan pemilihan kepala daerah kan tidak. Rakercabsus itu kan proses penjaringan, kalau yang terjaring termasuk saya (Baktiono) tapi belum waktunya dan pak Armuji tapi beliau tidak mau. La disana semua melakukan sosialisasi ke bawah. Kalau dianggap tidak kuat menghadapi lawan, partai berhak menentukan alternatif, siapa yang bisa menjalankan kebijakan politiknya yang pas.”¹⁰⁸

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Wisnu Sakti Buana , Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya dan Wakil Ketua DPRD Surabaya, pada 08 /11/2012 pk 16.15 WIB

¹⁰⁸ Wawancara dengan Baktiono

Di PDI Perjuangan apabila sudah ada keputusan harus dikerjakan bersama-sama, dan juga ada semangat gotong royong yang mungkin tidak dimiliki partai lain. Keputusan DPP memang tidak bisa diganggu gugat karena DPP mempunyai bahan pertimbangan yang cukup dan kuat dari hasil masukan, saran, dan survei yang telah ada dan dilakukan. Jadi seluruh kader baik anggota dan pengurus partai di PDI Perjuangan harus tunduk dan patuh untuk melaksanakan amanat putusan tersebut. Survei memang menjadi kekuatan karena ada pertimbangan dan hasil secara ilmiah seperti yang disampaikan oleh Aven Januar

“Untuk menduduki jabatan kepala daerah, pertama harus melalui Konfercabsus. Jelas diatur dalam peraturan partai bahwa harus melalui konfercabsus. Setelah itu yang kedua adalah melalui survei yang diatur kemudian dalam peraturan penjurangan dan pemilihan kepala daerah yang baru. Artinya juga ada pertimbangan-pertimbangan keilmiah an, jadi kurang lebih ya ada dua itu dalam pemilihan kepala daerah. Dari konfercabsus yang resmi setelah itu survei ini yang menjalankan adalah DPP itu jelas diatur.”¹⁰⁹

Di sinilah yang menjadi penting, karena rekomendasi DPP juga mengedepankan pertimbangan-pertimbangan keilmiah sebelum menentukan keputusannya. Perkembangan di masyarakat memang akan terlihat dalam proses tersebut, selain kapasitas dan kapabilitas dari seorang calon juga dipertarukan elektabilitasnya. Karena pemilih bisa menilai sendiri dari track record yang sudah dijalani oleh masing-masing kandidat yang ada. Masyarakat semakin pintar dan cerdas untuk menentukan pilihannya, kecenderungan itu bisa jadi pertimbangan utama yang sangat penting.

¹⁰⁹ Wawancara dengan, Aven Januar, Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPD PDI P Jatim, pada 09/10/ 2012 pk 10.21 WIB

Survei sebagai pilihan utama

Pengalaman pemilihan langsung kepala daerah yang telah dilakukan oleh PDI Perjuangan di daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota menjadikan banyak pelajaran yang dialami oleh partai bermoncong putih tersebut. Usaha untuk melakukan rekrutmen politik berbasis riset juga menjadi usaha yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan menyadari bahwa tingkat keterpilihan ternyata bisa diukur. Survei yang dilakukan dengan ukuran tertentu bahkan tingkat kesalahannya sangat kecil. Walaupun bukan menjadi satu-satunya tolak ukur namun survei bisa menunjukkan ukuran keterpilihan seseorang.

“Berkali-kali kita mengalami pilkada langsung, jadi kan kita sudah belajar dan berusaha untuk melakukan “based on riset” jadi kita ukur. Karna keterpilihan orang itu dan sebagainya itu ternyata bisa diukur, bahkan dengan ukuran tertentu salahnya hanya sedikit hanya nol koma. Ini yang kita lakukan sekarang, walaupun itu bukan satu-satunya menjadi tolak ukur tapi disalahnya kita bisa mengukur. Waktu itu jaman bu Risma nama-nama yang ada pak Wisnu Sakti (Ketua DPC), Pak Bambang DH (DPD). Waktu itu pak Bambang sebenarnya sudah tidak mau, tapi oleh partai ditugaskan untuk mendaftar. Karena di kita surveinya, pak Bambang masih tertinggi, tidak ada yang mengalahkan. Kalau undang-undang memperbolehkan, pak Bambang akan maju lagi menjadi Walikota. Dan termasuk siapapun yang menjadi Walikota, kalau pak Bambang jadi wakilnya pasti menang. Itu dari survey, kalau survey kita tidak hanya 1 lembaga yang dipakai. Jadi pak Bambang tetap mendaftar, karena dari partai kita tugaskan. Di PDI itu tidak serta merta orang yang pingin, tapi orang yang pas.”¹¹⁰

Berdasarkan pernyataan Nugroho SW tersebut, dari proses Rakercabsus yang menjaring usulan-usulan memang hanya muncul Nama Wisnu Sakti Buana (Ketua DPC), Bambang DH (Walikota), dan Saleh mukadar (Mantan Ketua DPC). Bambang DH dalam survei namanya masih tertinggi, sulit untuk dikalahkan apabila maju lagi menjadi calon Walikota. Namun Undang-Undang tidak

¹¹⁰ Wawancara, Nugroho SW

memperbolehkan untuk mencalonkan kembali sebagai Walikota. Pilihannya adalah Bambang DH sebagai calon Wakil Walikota, dan siapapun yang nantinya akan dicalonkan menjadi calon Walikota pasti bisa menang. Melihat dari survei yang dilakukan beberapa lembaga yang menempatkan Bambang DH masih tinggi. Sehingga partai menugaskan Bambang DH untuk mendaftar kembali walaupun sebagai calon Walikota. Karena siapapun yang ditugaskan partai harus mau melaksanakan, dan pastinya partai punya pertimbangan bahwa dia mampu melakukannya.

Dalam menentukan kriteria calon Walikota Surabaya, dituntut untuk harus mampu menangani masalah kota Surabaya. Tidak perlu elektabilitas yang tinggi karena sudah di dongkrak oleh elektabilitas Bambang DH. Selanjutnya bukan tokoh yang lahir karena konflik, artinya bukan dimunculkan akibat konflik. Karena penting untuk bisa diterima di masyarakat pada semua golongan. Yang paling penting di PDI Perjuangan adalah mampu menyuguhkan agenda-agenda pro rakyat. Menyangkut tuntutan ideologi pada platform partai yang mengharuskan mempunyai visi-misi yang pro dengan rakyat. Semua itu dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut.

“Dengan ketiga kriteria itu pertama, harus mampu menangani permasalahan kota Surabaya, tidak perlu tokoh itu punya elektabilitas yang tinggi karena sudah di dongkrak elektabilitasnya oleh pak Bambang DH kan ngono. Kedua, bukan tokoh yang lahir karena konflik, artinya ketika dia dimunculkan akan terjadi konflik di masyarakat. Lalu yang ketiga, mampu menyuguhkan agenda-agenda pro rakyat kalau PDI kan itu. Dari ketiga kriteria itu dan hasil survei yang ketiga, Saleh dan Risma adalah dua nama tertinggi calon terkuat dan tinggal DPP yang mutusi. Namun kelebihan yang tidak dipunyai Saleh waktu itu, Bu Risma mampu merangkul yang lain selain PDI P. Ini yang menjadi poin plus nya dia dibanding Pak Saleh. Karena Pak Saleh diluar warga PDI P hanya mampu merangkul hanya 15 %. Jadi kelebihan Risma ini yang menjadi

pertimbangan DPP, ya seperti itu. Akhirnya Bu Risma dipilih PDI di DPP sana dengan pertimbangan itu. Atas kewenangan kongres, bahwa DPP bisa mengeluarkan satu nama atau paket itu bisa karena dalam kongres DPP mempunyai hak prerogatif itu.”¹¹¹

Dari ketiga kriteria diatas dan hasil survei yang ketiga muncul dua nama tertinggi adalah Saleh Mukadar dan Tri Rismaharini sebagai calon terkuat setelah Bambang DH di PDI Perjuangan. Tinggal DPP yang memutuskan untuk merekomendasi diantaranya. Kelebihan Risma yang tidak dipunyai oleh kandidat Saleh Mukadar adalah bisa merangkul semua golongan atau di luar PDI Perjuangan. Kelebihan Risma ini yang menjadi juga bahan pertimbangan DPP untuk memutuskan pilihannya. Atas kewenangan kongres lah DPP memang bisa mengeluarkan satu nama atau paket karena dalam kongres, DPP mempunyai hak prerogatif tersebut.

“Di Surabaya memang dalam Rakercabsus ada tiga nama itu, tapi di tengah jalan ada usulan nama Risma disampaikan ke DPP dari DPD. Awalnya usulan dari warga, salah satu motornya namanya Pak Jagat Hariseno, puteranya pak Tjip. Karena pak Jagat Hariseno itu punya lembaga survey sendiri, dia mensurvei bahwa tren nya bu Risma itu sangat bagus dan naik. Pak saleh itu sangat bagus tapi stagnan, sehingga bukan tidak mungkin kalau dengan politik uang dan sebagainya kita bisa kalah. Kalau bu Risma menang, meskipun lawan dengan segala cara itu tren itu akan naik dan tidak bisa mempengaruhi. Jadi kalau pak Bambang dipasangkan dengan bu Risma pasti menang. Itu semua kita laporkan ke DPP, dan DPP menentukan Risma. Jadi mungkin yang menjadi bahan pertimbangan utama ya survey, tapi bukan satu-satunya yang ada di PDI itu survey.”

Risma jika dipasangkan dengan Bambang hasil surveinya lebih bagus ketimbang Bambang dipasangkan dengan Saleh Mukadar dari hasil Rakercabsus. Melihat bahwa Saleh suaranya tinggi hanya di warga PDI Perjuangan. Sedangkan Risma dalam survei hasilnya tren elektabilitasnya bagus, cenderung naik.

¹¹¹ Wawancara dengan, Aven Januar

Dibandingkan dengan elektabilitas Saleh Mukadaryang saat itu sangat bagus tapi cenderung stagnan. Berbeda dengan Risma yang walaupun dengan cara apapun tren elektabilitasnya naik dan tidak bisa mempengaruhi. Jadi menurut Nugroho diatas kalau Pak Bambang DH dipasangkan dengan Bu Risma pasti akan menang. Barulah dari sana DPP menentukan Risma dengan pertimbangan utama hasil survei tersebut.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Sukadar sebagai fungsionaris DPC PDI Perjuangan Surabaya. Memilih Risma karena tidak ada yang lain, dalam arti yang bisa mengalahkan keterpilihan pasangan Risma Bambang. Oleh sebab itu mengapa dipilih slogan “Risma-Bambang not the others”. Menurut Sukadar, Saleh sendiri apabila mau memproduksi wacana dan isu bisa saja elektabilitasnya lebih tinggi. Namun karena Saleh yang sering membuat *resistensi* atau perlawanan dengan berbagai pihak. Menjadikan Saleh sangat rentan untuk dijatuhkan elektabilitasnya.

“Risma Bambang not the others, kenapa kita pake itu karna tidak ada pilihan liane. Saleh gelem produksi gede Saleh. Soale Saleh kakehan berulah, lek gag berulah yo iso. Terlalu banyak bikin resistensi. Nek Risma kan buta politik, gag roh lor kidul, sing d idol duk Risma e tapi Bambang Dh ne. Pemilu PDI itu pemilu emosional, masio bengok-bengok o nang njobo, ketika dihadapkan pada sebuah pilihan gag mungkin mlayu wong PDI. Ngomong jaringane Risma 5 %, PDI 20 %, during teko Bambang Dh iku mau sing ngarakno keterpilihane (elektabilitase) iku munggah.”

PDI Perjuangan adalah partai yang secara komposisi memang sebagai partai politik massa yang mempunyai basis masa yang cukup kuat di tingkat bawah. Pemilih PDI Perjuangan dalam setiap pemilu adalah pemilih emosional. Yang sulit untuk berpaling suaranya kecuali ada faktor tertentu. Karena pada tingkatan basis masa PDI Perjuangan mampu menanamkan dengan kuat ideologi

yang dibawanya. Bahkan PDI Perjuangan mampu mengatakan meskipun isu apapun yang dilontarkan sebelum pemilihan umum, dan warga PDI Perjuangan dihadapkan pada sebuah pilihan maka pemilih nya tidak akan lari.

5.4 Dilema Regulasi Rekrutmen Partai

Rekrutmen politik kepala daerah di internal PDI Perjuangan sebenarnya sudah diatur oleh keputusan DPP melalui Surat Keputusan DPP No. 024/KPTS/DPP/VII/2005 yang disempurnakan kembali dengan diterbitkannya Surat Keputusan No.424/KPTS/DPP/X/2009 tentang penyempurnaan petunjuk pelaksanaan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Di dalam aturan tersebut diatur mengenai mekanisme *bottom up* atau jaring aspirasi dari bawah mulai tingkatan Pengurus Anak Ranting atau dari tingkat RT/RW, Lorong, Gang, Pengurus Ranting di tingkat Desa atau Kelurahan, PAC di tingkat Kecamatan, dan Pengurus DPC di tingkat Kabupaten/ Kota melalui forum Rapat Kerja Cabang Khusus atau *Rakercabsus*. Yang juga diperkuat oleh testimony yang diberikan Baktiono selaku fungsionaris DPC PDI Perjuangan Surabaya sebagai berikut:

“.....Di PDI Perjuangan usulan- usulan itu berasal dari cabang ke anak cabang, ranting ke anak ranting mereka juga rapat. Jadi menentukan siapa yang diusung, diusulkan dalam forum yang namanya Rakercabsus “Rapat Kerja Cabang Khusus”. Usulan-usulan itu dijaring dari warga yang dibawah, usulan itu masuk setelah itu dibawa ke forum Rakercabsus. Disana juga ada yang namanya forum Rakerancab “Rapat Kerja Anak Cabang” itu menerima, menjaring atau menyaring usulan dari bawah itu siapa saja. Makanya kalau masuk lewat PDI Perjuangan, harus di lobi dari tingkat bawah atau RW disana juga yang menjaring. Jadi sekarang bukan top down tapi bottom up, disana nanti dipresentasikan dan didebatkan mengapa kok mengusung calon itu baik calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Nanti baru diputuskan dalam forum

*Rakercabsus, ini sebatas untuk menjaring. Nanti juga dievaluasi kembali oleh DPD Provinsi Jawa Timur, juga nantinya dibawa sampai DPP.*¹¹²

Seperti yang diungkapkan Baktiono tersebut, setelah berita acara hasil rakercabsus tersebut selesai kemudian dibawa ke DPD di tingkat Provinsi untuk di serahkan kepada DPP di tingkat pusat untuk di berikan rekomendasi sebagai calon kepala daerah yang di usung partai bermoncong putih tersebut. Namun dalam dengan alasan dan pertimbangan tertentu yang di atur dalam Juklak rekrutmen kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut , terdapat aturan yang tumpang tindih dengan memberikan kewenangan untuk DPP yang memberikan rekomendasinya di luar mekanisme yang sudah dilalui dari bawah tersebut. Yang kemudian juga ditemukan bahwa posisi tersebut diperkuat oleh hak DPP dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI perjuangan.

Yang di dalamnya mengatur bahwa apabila hasil keputusan DPP wajib tunduk dan patuh untuk dilaksanakan oleh struktural partai di bawahnya. Karena sebagai kader mereka adalah petugas partai yang harus siap apabila di berikan perintah atau tugas oleh partai. Apabila tidak menjalankannya maka DPP dapat membekukan struktural partai di bawahnya. Dan dapat dilakukan sanksi pemecatan sebagai anggota maupun kader partai. Jadi dapat dikatakan bahwa konsistensi mekanisme rekrutmen politik untuk Kepala Daerah khususnya pada DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya perlu dipertanyakan. Dengan aturan partai yang tumpang tindih tersebut tidak jarang membuat konflik di dalam internal partai yang juga dapat merusak soliditas partai.

¹¹² Wawancara dengan Baktiono, Bendahara DPC PDI Perjuangan Surabaya dan anggota Komisi D DPRD Surabaya, pada 05/10/2012 pk 13.42 WIB

Implementasinya proses rekrutmen kepala daerah untuk Kota Surabaya di DPC PDI Perjuangan memang terlihat sekali tidak tergambar bagaimana seharusnya. Dimana spirit bottom up yang semestinya sudah ada dalam Juklak tidak dibangun dalam proses implementasinya. Yang mana mulai dari Rakerancab yang semestinya di selenggarakan harus ditiadakan dengan alasan kepentingan politik dan *cost politic*. Hanya dilakukan Rapat Anak Cabang untuk memutuskan rekomendasi di tingkat kecamatan, siapa calon yang akan diusung dalam mekanisme Rakercabsus. Seperti di jelaskan oleh Sukadar sebagai fungsionaris DPC PDI Perjuangan Surabaya berikut:

“.....memang waktu itu gak onok proses Rakerancab, yang dilakukan waktu itu hanya melalui Rapat Anak Cabang. Bedane kalau Rapat Anak Cabang hanya diikuti oleh pengurus Anak Cabang. Kalau Rakerancab yang mana sifatnya rapat kerja harus melibatkan struktur Ranting dan Anak Ranting di bawahnya”¹¹³

Begitu juga dalam proses penyaringan yang dilakukan oleh DPP ternyata diketahui bahwa salah satunya atas saran dari pengurus DPD yang mengusulkan calon di luar rekomendasi hasil Rakercabsus. Yang pada akhirnya DPP pun juga merekomendasi di luar hasil mekanisme *bottom up* yang telah dilalui dari hasil Rakercabsus. Dengan dalih untuk kepentingan pemenangan partai yang merujuk pada hasil ilmiah berupa survei yang dilakukan tim dari DPP PDI Perjuangan di kota Surabaya dan saran dari beberapa elit partai. Ini pada akhirnya menimbulkan suatu dilema peraturan partai yang mengatur mekanisme rekrutmen kepala daerah di internal PDI Perjuangan

¹¹³ Wawancara dengan Sukadar, Ketua Bidang Kaderisasi dan Rekrutmen DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya , pada 29/01/2013 pk 21.00 WIB